

ISLAM DALAM PERUBAHAN NAMA DIRI SUKU BUGIS

Aslan Abidin

Universitas Negeri Makassar.

Jl. A. P. Pettarani, Makassar 90222 Telp: +62-411869834

aslanabidin01@gmail.com

HP. +62-81242244700

Abstract: This research studied the proper name of Bugis tribe as a symbol of oral and written language. The symbol was originated from either Bugis language and culture or others. The language was selected through a convention among Bugis community. However, there were always a historical background to achieve a convention on the choice of the language used as the proper name of Bugis people. For instance, most former names of Bugis people using Bugis language were changed into Arabic language after the people converted to Islam in the 17th century. This study applied historical approach towards the texts of Bugis proper names that were changed based on religious, political, and social events. In fact, the series of Bugis events were written in the changes of Bugis proper names. Bugis conquest by the Kingdom of Gowa-Tallo in Islam's War (Musu Selleng), the Dutch and Japanese colonization, Kahar Muzakkar rebellion, the arrival of schools and popular culture, was the backdrop of events changing the proper name of Bugis.

Keywords: symbol, language, history, Bugis, Islam.

Abstrak: Penelitian ini menempatkan nama diri suku Bugis sebagai simbol bahasa lisan maupun tulisan. Simbol tersebut bisa berasal dari bahasa dan kebudayaan Bugis sendiri, maupun bahasa dan kebudayaan di luar suku Bugis. Bahasa itu disematkan berdasar kesepakatan atau konvensi masyarakat Bugis. Walau berdasar konvensi, selalu ada peristiwa sejarah yang melatari disepakatinya penggunaan bahasa tertentu sebagai nama diri suku Bugis. Peristiwa sejarah itu sekaligus merupakan penetrasi budaya yang mengubah nama diri orang Bugis. Semisal nama kebanyakan suku Bugis, yang sebelumnya berbahasa Bugis, setelah menganut Islam di abad ke-17, berubah menggunakan bahasa Arab. Studi ini menerapkan pendekatan sejarah terhadap teks-teks nama diri orang Bugis yang berubah berdasarkan peristiwa keagamaan, politik, maupun sosial. Runtutan peristiwa

sejarah kebudayaan Bugis, ternyata tercatat dalam rentetan perubahan nama diri suku Bugis. Penaklukan Bugis oleh Kerajaan Gowa-Tallo dalam Perang Islam (Musu Selleng), penjajahan Belanda, Jepang, pemberontakan Kahar Muzakkar, kedatangan sekolah, budaya populer, menjadi latar peristiwa berubahnya nama diri orang Bugis.

Kata kunci: simbol, bahasa, sejarah, Bugis, Islam.

A. PENDAHULUAN

Bahasa merupakan bagian terpenting dalam perkembangan kebudayaan sebuah suku bangsa. Bahasa, yang juga adalah produk kebudayaan masyarakat penggunanya, berkembang beriringan laju dinamika kebudayaan lainnya: seperti gejolak politik, agama, dan sosial. Bahasa bahkan menjadi media yang mengungkap, merekam, serta menyimpan peristiwa-peristiwa penting seperti perubahan politik, pergantian agama, masalah sosial, sampai pergeseran nilai-nilai masyarakatnya.

Salah satu 'bahasa' yang menyimpan gejolak perkembangan kebudayaan suku Bugis adalah bahasa yang melekat sebagai nama diri (*propername*) orang Bugis. Nama diri orang Bugis, yang merupakan identitas khas seorang Bugis, telah mengalami sejarah perubahan yang panjang. Perubahan tersebut disebabkan adanya kontak budaya suku Bugis dengan peradaban suku bangsa lain dari luar Sulawesi Selatan, yang terutama mengakibatkan bergantinya agama, pergolakan politik, sampai pergeseran paham tata nilai dalam masyarakat Bugis.

Terjadinya kontak budaya dan perubahan kebudayaan tersebut, merupakan hal yang mutlak terjadi, sebagaimana dialami kebanyakan suku lain di dunia. Hal seperti itu merupakan 'keadaan menyeluruh yang sempurna' dengan melibatkan peniar agama, pedagang (Malinowsky, 1983:21-22), sebagai agen perubahannya, termasuk raja atau kepala suku, penjajah, pemberontak, tentara sampai guru.

Sebagaimana disebutkan van Heekeren yang dikutip Pelras (1996: 21-22) bahwa peradaban suku Bugis diperkirakan telah berlangsung sekitar 50 ribu dan 30 ribu tahun Sebelum Masehi di tempat yang kini disebut Sulawesi Selatan. Peradaban Bugis juga berkembang, beradaptasi, serta berubah berdasarkan dampak penetrasi kebudayaan lain yang mempengaruhinya. Bukti-bukti persentuhan kebudayaan Bugis dengan suku bangsa lain bahkan dapat ditelusuri dari sejarah bahasa nama-nama diri yang pernah atau kini masih digunakan orang Bugis.

Studi terhadap nama diri manusia memang belum banyak dilakukan

(Wibowo, 2001:45). Hal yang sama sepertinya juga terjadi pada studi mengenai latar belakang budaya, peristiwa, maupun bahasa yang membentuk nama diri sebuah suku atau anggota masyarakat. Padahal, nama diri—sebagai salah satu simbol lisan dan tulisan yang memiliki makna tertentu—juga selalu menggunakan bahasa. Baik itu bahasa dari suku penggunanya sendiri maupun bahasa yang diadopsi dari suku atau bangsa lain.

Suku Bugis merupakan salah satu suku yang nama diri anggota sukunya, telah mengalami perubahan berdasarkan evolusi kebudayaan suku Bugis. Nama diri orang Bugis kini tidak lagi hanya menggunakan bahasa Bugis, tetapi telah bercampur bahasa dari kebudayaan suku atau bangsa lain. Perkembangan persentuhan kebudayaan orang Bugis dengan suku bangsa lain bahkan dapat membuatnya menggunakan nama diri yang sepenuhnya diambil dari bahasa Portugis, Arab, Jawa-Melayu-Sansekerja, sampai bahasa Latin.

B. STUDI SEJARAH TEKS

Studi ini merupakan pengamatan terhadap tanda atau teks-teks nama diri orang Bugis yang tertera dalam naskah (*sure'*) kuno *La Galigo*, buku antropologi, sosiologi, dan sejarah mengenai suku Bugis. Teks nama lainnya diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara dengan orang atau orangtua pemilik nama diri berbahasa Bugis atau bahasa dari kebudayaan lain di luar budaya suku Bugis. Teks-teks nama tersebut dicermati perubahan atau pergantiannya dari nama (bahasa dan kebudayaan) sebelumnya ke nama (bahasa dan kebudayaan) yang baru.

Perubahan itu lalu dihubungkan dengan peristiwa dan musabab yang melatari terjadinya pergantian nama. Selain itu, juga akan dibahas beberapa motif-motif dalam pemberian nama diri orang Bugis. Termasuk konteks serta harapan-harapan orangtua suku Bugis dalam memberikan nama ke anak keturunannya.

Pengamatan terhadap perubahan teks nama-nama suku Bugis tersebut – sebagai sebuah simbol bahasa dari kebudayaan tertentu— dilakukan secara kronologis-historis. Sehingga studi ini, apabila merujuk pendapat Franz Boas, juga merupakan suatu pandangan “historis” yang khas terhadap suatu budaya. Sebuah kajian mengenai suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat suku Bugis.

Budaya suku Bugis tersebut, berubah disebabkan kedatangan budaya lain dari luar wilayah suku Bugis dan mempengaruhinya. Lebih jauh Boas mengatakan bahwa semua budaya terbentuk dari sekumpulan ciri perangai yang rumit

dan merupakan akibat dari kondisi lingkungan, faktor psikologis, dan kaitan historis. Unsur-unsur suatu budaya merupakan produk proses historis yang rumit dan banyak melibatkan penyebaran serta pengambil-alihan perangai serta kompleks perangai dari budaya lain di sekitarnya (Kaplan dan Manners, 97: 2002).

C. NAMA DIRI SEBAGAI TANDA

Teks-teks nama diri dalam studi ini dipahami sebagai tanda atau simbol bahasa dari kebudayaan tertentu yang digunakan berdasarkan kesepakatan (konvensi) masyarakat penggunaannya. Makhluk manusia –selain memberi nama terhadap benda-benda di sekitarnya— juga memberi nama bagi dirinya sendiri. Nama diri manusia sebagaimana nama atau sebutan terhadap benda-benda lain di sekitarnya adalah simbol atau tanda kebahasaan.

Tanda kebahasaan tersebut, menurut Ferdinand de Saussure (1988: 147) terdiri dari perpaduan antara *concept* (penanda) dan *image acoustique* (petanda), sebagaimana tanda dari nama diri manusia. Sebagai konsep dan imaji akustik, nama diri –awalnya secara umum dalam masyarakat Bugis— diambil dari bahasa dan acuan makna kebudayaan Bugis. Hal itu menjadi pembeda yang jelas antara nama satu suku bangsa dan kebudayaan dengan nama suku bangsa dan kebudayaan yang lain.

Akan tetapi, sebuah suku bangsa dapat saja menggunakan nama diri dari bahasa dan kebudayaan di luar dari bahasa dan kebudayaannya. Keadaan itu disebabkan adanya kontak budaya antar-suku bangsa yang dapat berbentuk tindakan kekerasan penjajahan (dominatif) atau terpaksa. Selain itu, bisa juga berlangsung secara sukarela (hegemonik) karena mengidolakan nama dari bahasa kalangan suku atau kebudayaan lain.

D. PERUBAHAN NAMA SUKU BUGIS

Sifat semena-mena dan konvensionalnya penggunaan sebuah tanda bahasa—baik lisan maupun tulisan—membuat nama seseorang dapat pula berubah-ubah, tergantung kesepakatan orang banyak. Hal itu juga terjadi terhadap penamaan diri seseorang dalam kebudayaan Bugis. Nama orang Bugis, terutama dalam kebudayaan lisan suku Bugis, juga dapat berubah atau diubah berdasarkan usia maupun status sosial si pemilik nama.

Saat masih bayi hingga bocah, seorang Bugis selalu memiliki nama sebagai penanda yang merujuk ke statusnya sebagai anak-anak. Misalnya, kalau berdasarkan jenis kelamin, panggilan paling umum bagi anak laki-laki Bugis adalah Baco' dan perempuan dipanggil Becce'. Selain itu, dapat juga seorang

anak mendapat nama berdasarkan bentuk tubuhnya, misalnya Bondeng yang dalam bahasa Bugis berarti tambun.

Setelah berkeluarga dan memiliki keturunan, nama panggilan orang Bugis masih juga dapat berubah. Sepasang orangtua Bugis bisa saja dipanggil menggunakan nama anak sulungnya. Orangtua dari kalangan bukan bangsawan misalnya, yang memiliki anak sulung bernama Usman—yang dalam dialek Bugis berbunyi Semmang— akan dipanggil sebagai Ambo' Semmang (Ayahnya Semmang) dan Indo' Semmang (Ibunya Semmang).

Perubahan nama serupa—dengan gelaran yang berbeda—juga terjadi di kalangan bangsawan. Nama itulah yang digunakan dalam kehidupan dan tata krama Bugis. Bahasa lisan (dikarenakan tidak resmi tertulis) terutama membantu membuat nama-nama mereka mudah diubah menjadi lebih mendekati konteks dan keadaan si pemilik nama yang dirujuk.

Keadaan itu sedikit berbeda ketika suku Bugis masuk menjadi bagian peradaban modern Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peradaban dari luar suku Bugis itu, dengan tradisi tulis huruf Latin, memperkenalkan nama resmi yang dicatat oleh negara di akta kelahiran, ijazah, sampai Kartu Tanda Penduduk. Nama itu terutama digunakan dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan negara Indonesia. Orang Bugis kemudian memiliki dua jalur perolehan nama, satu dari tradisi Bugis dan satu lagi dari Pemerintah Indonesia.

Lebih jauh, nama diri dalam kebudayaan Bugis dapat dilihat dari nama tokoh-tokoh yang tertera dalam *Sure' La Galigo*. Menurut Salim (2011:16), satu tokoh dalam *La Galigo* dapat memiliki setidaknya tiga sebutan nama yang berbeda. Nama-nama tersebut berfungsi sebagai namanya (*asenna*), gelarnya (*pattellarena*), dan panggilannya (*pappasawe'na*). Salim mencontohkan tokoh bernama panjang Lapatigana Datu Patotoe Sangkuruwira Tuppu Batu ri Wiring Langi. La Patigana (namanya), Datu Patotoe Sangkuru Wira Tuppu Batu (gelarnya), ri Wiring Langi (panggilannya). Permaisuri La Patigana adalah We Lette Somp (Petir yang Disembah). Kedua nama tersebut dengan mudah dapat dikatakan sebagai bersumber dari bahasa dan kebudayaan suku Bugis.

Kini, nama diri kebanyakan suku Bugis tidak lagi sepenuhnya menggunakan bahasa Bugis seperti kedua nama di atas. Nama diri suku Bugis telah berubah seiring persentuhan kebudayaan orang Bugis dengan kebudayaan lain yang datang ke dalam kehidupan peradaban suku Bugis. Perubahan situasi politik di Nusantara mendorong terjadinya kontak antara suku Bugis dengan kebudayaan lain.

Pelras menyebutkan dua peristiwa besar yang sangat mempengaruhi

terjadinya perubahan kebudayaan suku Bugis. *Pertama*, penaklukan Portugis atas Malaka tahun 1519 (Pelras, 1996: 124). Peristiwa itu membuat orang-orang Portugis pergi meninggalkan Malaka datang dan menetap di kerajaan-kerajaan Bugis. *Kedua*, masuknya Islam ke Kerajaan Gowa-Tallo dan membuat kerajaan kembar itu menyerang kerajaan-kerajaan suku Bugis untuk memaksanya menganut Islam. Setelah lima tahun dalam pergolakan 'Perang Islam' atau *Musu Selleng*, Kerajaan Bone akhirnya takluk dan menerima Islam sebagai agama kerajaannya di tahun 1611. Kedua kejadian penting itu disebut Pelras sebagai peristiwa yang mengakibatkan perubahan besar-besaran di Sulawesi Selatan.

Kedatangan orang Portugis ke Tanah Bugis antara lain dicatat oleh pedagang Portugis, Antonio de Paiva. Ia menuliskan bahwa pedagang muslim Melayu Patani, Pahang, dan Ujung Tanah dari Semenanjung Melayu dan Minangkabau telah menjalin perdagangan dengan Kerajaan Siang sejak akhir tahun 1490 (Jacobs, 'First Christianity': 295 via Pelras, 1996: 124-125). Paiva berangkat dari Malaka tahun 1542 (Pelras, 1996: 127) bersama 12 temannya dan tiba di Parepare tahun 1543 (Mattulada, 1985: 2). Paiva turut melakukan perubahan kebudayaan penting di wilayah cukup luas suku Bugis yang disebut Ajattappareng. Wilayah itu kini meliputi Kabupaten Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru, dan Kota Parepare.

Paiva membuat orang Bugis berubah nama ke bahasa dan budaya Portugis ketika ia berhasil mengkristenkan Raja Suppa', La Makkarawie, bersama istri dan anaknya. Nama La Makkarawie lalu diubah menjadi Don Luis. Sementara seorang anak gadis Raja Suppa' diubah namanya menjadi Dona Elena Vesiva. Selanjutnya, Paiva mengkristenkan Raja Siang di Pangkajene. Raja Siang dibaptis di gereja Santo Rafael Pangkajene dan namanya juga diganti menjadi Don Juan (Mattulada, 1985: 3) atau Don Juan To Binanga (Poelinggoman, 2004: 78).

Pembaptisan raja-raja sekutu Suppa' seperti Alitta dan Bacukiki' berlanjut setelah kedatangan Pendeta Vicente Viegas tahun 1545. Hanya saja, Pelras (1996: 127) tak menyebutkan nama maupun perubahan nama kedua raja itu setelah dibaptis. Adapun Poelinggoman (2004: 78) menuliskan bahwa Raja Alitta diberi nama Don Juan Manuel. Kontak budaya Portugis dengan Kerajaan Suppa dan Siang serta kerajaan di sekitarnya tidak berlangsung lama disebabkan sebuah kisruh.

Ketika itu, perwira Portugis, Juan de Eredia, pergi melarikan anak gadis raja Suppa'. Setelah itu, tak ada orang Portugis yang berani kembali ke Suppa' hingga tahun 1549 (Pelras, 1996: 128). Peristiwa itu sekaligus menghentikan

kemungkinan orang Bugis—dan boleh jadi orang-orang di Sulawesi Selatan—untuk menganut agama Kristen.

Sebagai tambahan, selain memberi pengaruh bagi agama dan nama orang Bugis, orang Portugis juga disebut sebagai pemberi nama *Celebes* bagi Pulau Sulawesi. Kartografer Nicholas Desliens, dalam sebuah peta yang digambarnya tahun 1541, memberi nama '*Ponta dos Celebres*' (Tanjung Orang-orang Termasyhur) pada bagian utara Pulau Sulawesi yang kemudian menjadi sebutan untuk seluruh Pulau Sulawesi (Franca, 2000: 60). Sementara bahasa Bugis *kadera* (kursi) juga sangat mungkin berasal dari bahasa Portugis, *cadeira* (Franca, 2000: 103).

Perubahan nama dan bahasa orang Bugis selanjutnya dipengaruhi oleh masuknya Islam ke kerajaan-kerajaan Bugis. Adalah Abdul Makmur, (Dato' ri Bandang), Sulaiman (Dato' ri Patimang), dan Abdul Jawad (Dato' ri Tiro) – setelah gagal melakukan Islamisasi di Kerajaan Gowa-Tallo— tanggal 4 atau 5 Februari 1605, berhasil mengislamkan Raja Luwu', La Patiware. Nama La Patiware lalu diubah menjadi Sultan Muhammad Waliul Mudaruddin.

Setelah mengislamkan raja Luwu' –sebagai tambahan sebab studi ini mengkaji perubahan nama suku Bugis dan bukan suku Makassar— ketiga misionaris Islam di atas kembali ke Makassar. Hanya berjarak waktu selama delapan bulan, mereka berhasil pula mengislamkan Raja Tallo, Karaeng Matoaya. Nama Karaeng Matoaya kemudian diganti menjadi Sultan Abdullah Awwalul Islam. Selanjutnya, Sultan Abdullah Awwalul Islam mengajak Raja Gowa, I Manga'rangi Daeng Manra'bia untuk masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Ala'uddin. Pengislaman kedua raja itu berlangsung pada tanggal 9 November 1607 (Pelras, 1996: 135, mengutip Noorduyn, *Islamistering van Makassar*).

Setelah Raja Gowa-Tallo masuk Islam, mereka kemudian mengajak raja-raja di sekitarnya untuk turut menganut Islam. Ketika ajakan mereka ditolak, kerajaan kembar itu melancarkan serangan bersenjata. Sebuah perang yang dikenal orang Bugis sebagai *Musu Selleng* (Perang Islam) yang berlangsung selama empat tahun (Noorduyn, 1972:35). Tahun 1608, Kerajaan Gowa-Tallo berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan seperti Bacukiki', Suppa', Sawitto, dan Mandar, menyusul Akkontengeng dan Sakkoli. Lalu tahun 1609 menguasai Sidenreng dan Soppeng. Kemudian tahun 1611 menduduki Bone (Pelras, 1996: 136-137).

Selanjutnya terjadi pengislaman sekaligus perubahan nama dari nama berbahasa Bugis ke nama berbahasa Arab yang merupakan muasal kebudayaan

Islam. Raja Bone ke-11, yang bernama Bugis La Tenrirua (Noorduyn, 1972: 35) atau La Tenrirawe (Matulada, 1996: 245), disebut-sebut sebagai orang Bone pertama yang beragama Islam. Ia menganut Islam ketika Perang Islam (*Musu Selleng*) masih berlangsung. Setelah turun tahta dan meninggal, La Tenrirua atau La Tenrirawe diberi atau ditambah namanya oleh Raja Gowa menjadi La Tenrirua Arung Pattiro Adamulmarhum Kalinul Awalul Islam.

Sementara Raja Bone ke-12, La Tenripala menerima Islam tahun 1610. Ia lalu diberi gelar Sultan Abdullah. Setelah berkuasanya Raja Bone ke-13, La Maddaremmeng, kebudayaan Islam menjadi lebih berkembang di Bone. La Maddaremmeng memajukan agama Islam dengan membuat banyak lembaga-lembaga Islam. Nama-nama lembaga tersebut diambilnya dari bahasa Arab, seperti Dewan Syara'. Adapun orang-orang Bugis yang menjadi Pejabat Syara' (*Parewa Syara'*) juga dipanggil dengan sebutan bahasa Bugis bercampur bahasa Arab seperti *Petta Kali-e* (Khadi), *Petta Imang* (Imam), Khatib, Bilal, Mukim, dan Amil.

Perubahan-perubahan juga terjadi terhadap ritual-ritual Bugis. Ritual agama Bugis sebelumnya, yakni *Attoriolong* dengan pemuka agamanya yang disebut Bissu, berganti dengan ritual-ritual Islam. Nama ritual itu juga berbahasa Arab seperti Maulid, Isra'-Mi'raj, Idul Fitri, dan Ied (Mattulada, 1996: 247). Nama ritual-ritual tersebut lalu menjadi latar –terutama sebagai motif penanda waktu kelahiran— bagi penamaan terhadap orang Bugis. Misalnya, orang Bugis yang lahir di hari Idul Fitri diberi nama Fitri atau lahir bertepatan dengan hari Isra'-Mi'raj sehingga diberi nama Isra'.

Penanda waktu kelahiran lainnya banyak diambil dari nama-nama hari dan bulan Arab. Nama hari seperti Wahidun (Ahad) menjadi nama Wahid, Isnaini (Senin) tetap sebagai Isnaini, serta Hamzatun (Kamis) ke Hamzah, merupakan nama Bugis yang banyak digunakan. Menyusul nama-nama bulan yang cukup populer dijadikan nama seperti Ramadhan, Muharram, Syawal, Shafar, dan Rajab.

Selanjutnya, nama tambahan –yang merupakan gelar— di depan nama orang Bugis adalah H dan Hj, kependekan dari kata Haji atau Hajjah. Gelar itu merupakan hasil persinggungan dengan budaya Islam-Arab (menunaikan ibadah haji ke Mekah) yang kemudian dipolitisir dalam dominasi politik penjajah Belanda. Gelar *Haji* adalah stigma buruk yang disematkan penjajah Belanda ke orang Bugis yang pulang dari beribadah haji. Melalui *Staatsblad* (Undang-undang) tahun 1903, penguasa Belanda mewaspadaikan dan mengawasi orang-orang Bugis—dan juga warga pribumi lain dalam wilayah jajahan

Belanda di Nusantara—yang telah pulang dari ber-haji.

Pemerintah kolonial Belanda mencurigai orang-orang yang pergi ber-haji juga belajar hal-hal mengenai pemberontakan dan kemerdekaan di Mekah. Belanda takut, ketika pulang dari haji, mereka akan melakukan gerakan perlawanan atau pemberontakan. Beberapa tokoh penting gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda di Nusantara –yang juga dapat dilihat dalam Daftar Pahlawan Nasional Indonesia— memang bergelar Haji. Sebutlah misalnya K.H. Samanhudi yang mendirikan Serikat Dagang Islam, K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, dan K.H. Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama.

Selanjutnya, nama-nama orang Bugis menggunakan bahasa Arab yang diambil dari nama orang-orang penting dalam Islam seperti Muhammad, Abdullah, maupun Fatimah. Awalnya, nama-nama tersebut masih bisa lebur dalam dialek bahasa Bugis. Misalnya Muhammad menjadi Muhammadong dengan panggilan Madong, Abdullah menjadi Beddu, dan Fatimah menjadi Fatimang dengan panggilan Timang.

Nama orang Bugis berikutnya berubah atau bertambah dengan berlatar peristiwa persentuhannya dengan penjajah Belanda. Ketika Belanda menduduki kerajaan-kerajaan Bugis dan mulai mencemaskan perlawanan kaum bangsawan menjelang tahun 1930, penguasa Belanda berusaha menarik hati kaum bangsawan dengan membebaskan mereka dari kerja paksa. Bangsawan-bangsawan Bugis lalu berusaha membuktikan kualitas kebangsawannya untuk mendapatkan sertifikat kebangsawanan dari Belanda dan diberi gelar Andi (Mattulada, 1974: 13-14,16 via Millar, 2009: 62-62). Aturan Belanda itu membuat nama orang Bugis hingga kini ada yang menggunakan gelar Andi.

Istilah Andi sangat mungkin berasal dari kata *Anri*, yang berarti adik. Istilah itu berpasangan dengan kata *Daeng*, yang berarti kakak. Dalam naskah *La Galigo*, sebagaimana disebutkan Kern bahwa tokoh-tokoh dari generasi yang sama adalah *Kaka* dan *Anri* (Kakak dan Adik) dan mereka saling menyapa seperti itu tanpa peduli apakah mereka bersaudara dekat atau berkerabat jauh. Misalnya, seorang suami akan menyapa *Anri* ke istrinya dan si istri akan menyapa *Kaka* ke suaminya (Kern, 1989: 14). Kata *Daeng* di depan nama orang telah terdapat dalam naskah I La Galigo, seperti *Daeng Siute*, *Daeng Palallo*, *Daeng Mamala* (Kern, 1989: 239), tetapi belum terdapat kata *Andi*. Kata *Andi* di depan nama orang Bugis antara lain dapat dilihat dalam naskah lontara' *Tolo' Rumpa' na Bone* (berkisah tentang perang dan kejatuhan Bone melawan Belanda) yang disebutkan ditulis I Malla' *Daeng Mabela* tahun 1908 dan ditulis kembali tahun 1916 (Tol, 2003: xiv). Sementara dengan mengutip JH Fredericky, Mattulada menyebutkan bahwa sebutan *Andi* digunakan sebagai tanda

kebangsawanan ketika Raja Bone diadakan kembali oleh penjajah Belanda di bulan April 1931 setelah ditaklukkan Belanda di tahun 1906 (Mattulada, 1991: 17- 21).

Pelopop pemberian nama Andi adalah Benjamin Frederik Matthes, seorang Belanda ahli bahasa dan kebudayaan Bugis. Matthes yang mengajar di Zuid Celebes dan mendirikan *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) di Makassar tahun 1918, hendak menyusun *Standen Stelsel* di Zuid Celebes, mendahului rencana pemerintah Belanda menetapkan *Standen Stelsel* bagi Sulawesi Selatan seperti yang telah ada di Jawa. Pemberian tambahan nama itu untuk memudahkan Pemerintah Belanda membedakan anak keturunan bangsawan dengan anak dari rakyat biasa. Matthes kemudian menambahkan nama Andi di depan nama bangsawan yang berada dalam jangkauan *Departement Onderwijs en Eeredients* (Matalatta, 2014: 39).

Andi Mattalatta –generasi awal yang bergelar Andi di Sulawesi Selatan—menuturkan bahwa saat dimasukkan ke *Gouvernement Inlandsche School* di Barru tahun 1927, bersama anak-anak keturunan bangsawan lainnya, ia diberi tambahan ‘Andi’ di depan namanya. Ketika Mattalatta mempertanyakan hal itu ke gurunya, dijawab bahwa itu merupakan perintah *Departement Onderwijs en Eeredients*. Sejak saat itu, melekatlah nama Andi di depan nama Mattalatta (Matalatta, 2014: 51).

Setelah itu, nama orang Bugis juga sedikit dipengaruhi oleh kedatangan penjajah Jepang tahun 1942. Hanya saja, persentuhan antara tentara Jepang dan suku Bugis yang kurang intens serta berjangka waktu pendek, membuat pengaruh mereka tidak terlalu kuat. Walau demikian, terdapat seorang dari Sengkang, Kabupaten Wajo, yang diberi nama Matsunaga oleh seorang tentara Jepang. Nama Jepang itu kemudian melekat di dirinya dalam dialek Bugis dan dipanggil Mannaga (Wawancara dengan Sitti Nurhawaisah Mannaga (70 tahun), warga asal Sengkang yang kini menetap di Makassar, tanggal 15 Agustus 2015).

Selanjutnya, nama orang Bugis juga dipengaruhi oleh latar belakang pemberontakan seorang Bugis bernama Kahar Muzakkar terhadap pemerintah negara Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Penumpasan pemberontak Kahar Muzakkar yang ingin mendirikan negara Islam di Sulawesi Selatan, dilakukan oleh tentara Indonesia yang didatangkan dari Jawa, sehingga oleh orang Bugis, mereka disebut Tentara Jawa. Tentara Jawa tersebut berasal Kodam VI Siliwangi. Mereka datang dan melakukan kontak kebudayaan dengan masyarakat Bugis di antara penghujung tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an.

Tentara Jawa itu juga turut bergaul dengan orang Bugis ketika bertugas menumpas pemberontakan hingga memulihkan keamanan pasca-penumpasan Kahar Muzakkar serta gerombolannya. Nama-nama Jawa mereka kemudian menjadi hal baru bagi orang-orang di Tanah Bugis. Mereka banyak memberi nama atau nama mereka dijadikan nama oleh orangtua bayi yang lahir ketika itu. Sehingga kini dapat ditemukan orang Bugis yang menggunakan nama Sudirman, Sukardi, maupun Sukiman. Mereka umumnya lahir di akhir tahun 1960-an atau awal tahun 1970-an. Nama dari peradaban suku Jawa itu turut menambah variasi dalam perkembangan nama-nama orang Bugis.

Berikutnya, perubahan atau tambahan gelar pada nama orang Bugis datang dari peradaban modern seperti lembaga ilmu pengetahuan semisal sekolah sampai perguruan tinggi. Sekolah pertama kali dibangun penjajah Belanda di Makassar tahun 1904 (Bosra, 2003) dan perguruan tinggi Universitas Hasanuddin berdiri juga di Makassar tahun 1956. Perguruan tinggi memberikan gelar yang berasal bahasa ilmu pengetahuan Eropa seperti Doktorandus, Insinyur, Dokter, Doktor, sampai Professor.

Lembaga pemberi gelar lainnya –yang secara khusus merupakan pangkat— adalah ABRI dan POLRI. Kedua lembaga itu membuat orang Bugis yang tentara atau polisi dipanggil berdasarkan pangkatnya, semisal Kapten, Komandan, atau Mayor. Seseorang yang memiliki gelar dari tentara atau polisi –bahkan yang telah pensiun sekalipun— sangat dihormati dan ditakuti kebanyakan orang di Tanah Bugis, terutama di tahun-tahun awal Kemerdekaan RI dan dalam masa Orde Baru.

Berbagai rangkaian sejarah perubahan nama tersebut, menjadikan seorang Bugis kini, dapat kita runut asal-usul atau latar belakang peradabannya dengan mencermati namanya. Misalnya, seorang Bugis bernama lengkap Dr. Andi Muhammad Sudirman Parenrengi. Gelar Doktor (bahasa Inggris: *Doctor*) datang dari tradisi modern Eropa, Andi terkait dengan penjajahan Belanda, Muhammad berasal dari peradaban Islam-Arab (diambil dari nama nabi umat Islam, Muhammad bin Abdullah), Sudirman dari peradaban Jawa, serta Parenrengi dari peradaban awal suku Bugis. Terlihat bahwa nama diri seorang Bugis dapat merupakan kata kunci dari beberapa peristiwa penting dalam perkembangan diri dan kebudayaan suku Bugis.

Hingga kini, nama diri orang Bugis masih terus berubah. Pengaruh teknologi internet, *smartphone*, media sosial, dan media massa, membuat orang Bugis juga berada di bawah hipnotis budaya populer. Nilai sebuah nama kemudian berhubungan dengan kebaruan atau *trend*. Sementara perihal baru

dan *trendy* merupakan penetrasi nilai yang dibentuk dan dicekockkan oleh media massa. Media massa televisi –dengan acara sinetron dan gossip artis— merupakan pengumbar nama-nama diri *trendy* yang kemudian ditiru untuk digunakan sebagai nama-nama diri orang Bugis.

Jadi jangan heran kalau di pelosok-pelosok tepi perkotaan di Sulawesi Selatan, dapat ditemukan anak-anak Bugis bernama Rayzha, Anastasia, Keshya, sampai Zidane. Nama orang Bugis akan terus berubah dan semakin beragam. Keberagaman nama suku Bugis itu sekaligus memperlihatkan bahwa nama diri serta kebudayaan suku Bugis sangat terbuka untuk dipengaruhi oleh penetrasi kebudayaan lain di sekitarnya.

E. SIMPULAN

Simbol nama yang dikenakan ke seorang Bugis, dapat merupakan *interpretant* dari suatu peristiwa politik, keagamaan, maupun sosial-budaya tertentu. Peristiwa-peristiwa sejarah itu telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan kebudayaan suku Bugis. Nama diri seorang suku Bugis dapat diinterpretasi sebagai kata kunci dari beberapa fase perkembangan kebudayaan suku Bugis. Peristiwa sejarah itu mengubah cara berbahasa, beragama, mencari pengetahuan, bergelar, berpangkat, berkebudayaan, dan terutama bernama-diri orang Bugis. Semakin keras dan lama berlangsungnya penetrasi sebuah kebudayaan, makin kuat pula pengaruhnya mengubah nama diri orang Bugis. Terbukti bahwa agama Islam yang dibawa masuk ke Tanah Bugis lewat cara pemaksaan dengan kekerasan perang (dominatif), hingga selanjutnya berterima secara sukarela (hegemonik), menjadi peradaban yang paling luas mempengaruhi perubahan nama diri orang Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmar, M. Andi. 2003. *Toloq Rumpaqna Bone: Edisi Teks dan Kajian Kesastraan*. Makassar: Masagena Press.
- Bosra, Mustari. 2003. “Dari Daengguru, ke Tuangguru, dan Anrongguru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan Tahun 1914-1942”. *Disertasi di Universitas Indonesia*.
- Franca, Antonio Pinto da. 2000. *Pengaruh Portugis di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kaplan, David dan Robert A. Manners. 2002. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kern, R.A. 1989. *I La Galigo*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Malinowsky, Bronislaw. 1983. *Dinamik Bagi Perubahan Budaya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran.
- Mattalatta, Andi. 2014. *Meniti Siri' dan Harga Diri: Catatan dan Kenangan*. Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara.
- Mattulada. 1991. "Manusia dan Kebudayaan Bugis-Makassar dan Kaili di Sulawesi". Dalam *Antropologi Indonesia: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia*, No 48, Thn XV, Januari-April 1991. Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
- _____. 1996. "Pola Perkembangan Islam dalam Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan". Dalam *Agama dan Perubahan Sosial*. Taufik Abdullah (ed). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Millar, Susan Bolyard. 2009. *Perkawinan Bugis*. Makassar: Inninawa.
- Noorduyn, J. 1972. *Islamisasi Makassar*. Jakarta: Bharatara.
- Pelras, Christian, 1996. *The Bugis*. Cambridge, Massachusetts: Blacwell Publisher.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris.
- Poelinggoman, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Salim, Muhammad. 2011. *Tiga dari Galigo*. Gianyar: Pemerintah Kota Makassar dan Yayasan Bali Purnanti.
- Saussure, Ferdinand de. 1988. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tol, Roger, 2003. "I Mallaq Daeng Mabela, Arung Manajeng, dan Naskah Otografi Toloq Rumpaqa Bone". Dalam Andi M. Akhmar. *Toloq Rumpaqa Bone: Edisi Teks dan Kajian Kesastraan*. Makassar: Masagena Press.
- Wibowo, Ridha Mashudi. 2001. "Nama Diri Etnik Jawa", *Jurnal Humaniora*, Volume XIII, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.